



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 23 JUNI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Wabup Minta Masyarakat Kawal Distribusi Bantuan Pangan

SIDOARJO (RM) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana meminta masyarakat yang menerima Bantuan Pangan dari pemerintah pusat untuk mengawal pendistribusian bantuan tersebut sehingga tidak ditemukan permasalahan.

"Kami meminta masyarakat penerima bantuan untuk segera melaporkan apabila menemukan kualitas beras yang kurang baik atau tidak layak konsumsi agar dapat segera ditindaklanjuti," kata Mimik dalam keterangan persnya, akhir pekan lalu.

Mimik menyatakan, jika dalam distribusi bantuan tersebut masyarakat menemukan beras yang rusak atau kualitasnya kurang baik, maka masyarakat harus segera melaporkan ke pihak yang bertanggung jawab.

Mimik juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek kualitas beras yang diterima. Jika ditemukan beras yang rusak atau kualitasnya kurang baik, maka masyarakat harus segera melaporkan ke pihak yang bertanggung jawab.

Mimik juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek kualitas beras yang diterima. Jika ditemukan beras yang rusak atau kualitasnya kurang baik, maka masyarakat harus segera melaporkan ke pihak yang bertanggung jawab.



SAHLURKAN BANTUAN: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana (tengah) saat menyerahkan bantuan pangan ke masyarakat.

Sukoderio, oleh Bupati Sidoarjo Subandi pada Rabu (16/6/2026) di Kabupaten Sidoarjo, Selasa, 16 Juni 2026, yang meliputi Desa Bangsi sebanyak 349 Keluarga Penerima Manfaat, Desa Puhung sebanyak 231 Keluarga Penerima Manfaat, dan Desa Sembung sebanyak 354 Keluarga Penerima Manfaat.

Selanjutnya, Kewas Tim Penggerak (TP) PKK Sidoarjo, Setiawan Subandi, menyerahkan bantuan pangan di Kecamatan Gedangan dengan total 1.451 Keluarga Penerima Manfaat yang terdiri atas 570 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Kebonanarom, 570 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Ganting, dan 500 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Karanghaji.

Kemudian sebanyak 2.052 Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan pangan tersebut dengan rincian Desa Kalsanpurno sebanyak 555 Keluarga Penerima Manfaat, Desa Ganggung sebanyak 486 Keluarga Penerima Manfaat, Desa Wadul sebanyak 604 Keluarga Penerima Manfaat, dan Desa Temu sebanyak 408 penerima.

Bupati Sidoarjo Subandi dalam penyaluran bantuan tersebut pada Kamis, 11 Juni 2026, di Desa Pabelan Kecamatan Sedati, mengatakan pemerintah daerah akan terus mengawal pengaliran bantuan pangan agar berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai data penerima yang telah ditetapkan.

Setiap keluarga penerima bantuan pangan tersebut akan mendapatkan 2.052 kilogram beras per bulan.

Bantuan pangan tersebut adalah beras yang dipesan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal.

"Ini merupakan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Semoga bantuan ini dapat membantu kebutuhan keluarga dan memberikan manfaat bagi warga yang menerimanya," ucapnya.

Di Sidoarjo sendiri, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng tersebut disalurkan ke 11.442 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam alokasi bulan Februari hingga Maret 2026. Penyaluran bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.



DIAWASI: Salah satu proyek penambalan jalan berlubang menjadi prioritas Pemkab.

Bupati Minta Proyek 2026 Tak Lagi Molor

restasi Sidoarjo," ujar AKP Rohmawati. dan membawanya ke... an lain sebelum melab... ban anak. (sur/vga)

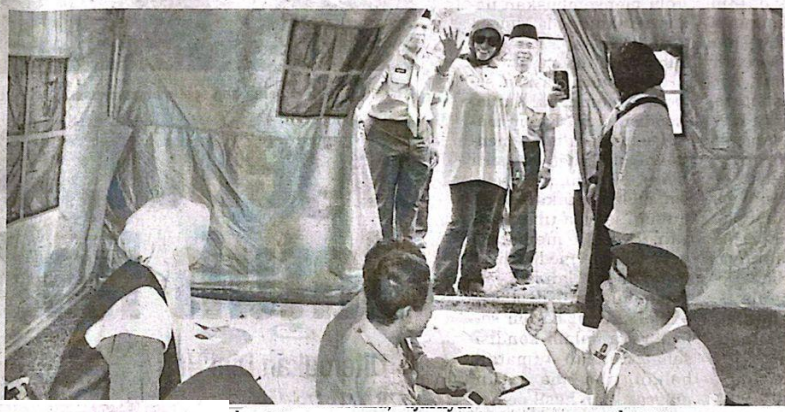
Dorong Anak Yatim Berani Bermimpi dan Mandiri

Wabup Buka 1.000 Yatim Camp

KREMBUNG-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana secara resmi membuka kegiatan 1.000 Yatim Camp yang digelar Forum Daerah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (FORDA LKSA) Kabupaten Sidoarjo di Bumi Perkemahan Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Minggu (21/6/2026).

Kegiatan perkemahan yang diikuti peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, serta anak-anak binaan LKSA tersebut berlangsung selama dua hari hingga Senin (22/6/2026).

Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada



PEDULI: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana membuka kegiatan 1.000 Yatim Camp di Bumi Perkemahan Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Minggu (21/6/2026).



RUANG PENDAMPINGAN: Penghuni liponkos meningkat seiring bertambahnya ODGJ.

Masalah Ekonomi dan Judol Picu Lonjakan Kasus ODGJ

berkontribusi terhadap terbenamnya sisa anggaran tersebut. "Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 1.100 miliar, yang melampaui target, serta adanya efisiensi dalam belanja

22 Calon Pengantin di Sidoarjo Positif HIV

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Fakta mengungkap terungkap di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 22 calon pengantin (catin) dinyatakan positif HIV hingga Juni 2026. Rinciannya 12 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

"Kami menemukan 22 calon pengantin positif HIV hingga Juni 2026. Rinciannya 12 orang laki-laki dan 10 orang perempuan," kata Ferry, Selasa (23/6/2026).

Menurut Ferry, kondisi tersebut bertepatan dengan meningkatnya kasus HIV di kalangan pasangan muda-mudi.

Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang HIV dan AIDS, serta kurangnya akses ke layanan kesehatan yang menyediakan tes HIV. Ferry berharap, dengan informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan diri dan pasangannya.

Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang HIV dan AIDS, serta kurangnya akses ke layanan kesehatan yang menyediakan tes HIV. Ferry berharap, dengan informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan diri dan pasangannya.

Wabup Minta Masyarakat Kawal Distribusi Bantuan Pangan

SIDOARJO (BM) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana meminta masyarakat yang menerima Bantuan Pangan dari pemerintah pusat untuk terus mengawal pendistribusian bantuan tersebut sehingga tidak ditemukan permasalahan.

"Kami meminta masyarakat penerima bantuan untuk segera melaporkan apabila menemukan kualitas beras yang kurang baik atau tidak layak konsumsi agar dapat segera ditindaklanjuti," kata Mimik dalam keterangannya, akhir pekan lalu.

Mimik menyatakan, jika dalam distribusi bantuan tersebut masyarakat menemukan beras maupun minyak goreng yang kondisinya tidak layak konsumsi, misalnya akibat kurang kering maupun warnanya menguning atau terdapat kerusakan lainnya, ia meminta warga untuk segera melaporkan melalui pemerintah desa terkait agar dapat ditukar dengan kondisi yang lebih baik.

Mimik menjelaskan, hingga pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan di Desa Kalisampurno dan Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, pada Kamis (18/6), dirinya belum menerima laporan warga terkait adanya kerusakan dalam bantuan yang dibagikan tersebut. Mimik juga berharap bahwa seluruh bantuan yang diterima warga berada dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi.

Selain itu, Mimik menyatakan bahwa dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar bantuan pangan yang diterima agar dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan tidak diperjualbelikan.

Menurutnya, program bantuan pangan tersebut merupakan bentuk perhatian



SALURKAN BANTUAN: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana (tengah) saat menyerahkan bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk warga di Kecamatan Tanggulangin, Kamis (18/6).

pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal.

"Ini merupakan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Semoga bantuan ini dapat membantu kebutuhan keluarga dan memberikan manfaat bagi warga yang menerimanya," ucapnya.

Di Sidoarjo sendiri, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng tersebut dialokasikan bagi 181.442 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dalam alokasi bulan Februari hingga Maret 2026. Penyaluran bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog tersebut berlangsung di sejumlah kecamatan selama Juni 2026 dengan total bantuan mencapai 3.628.840 kilogram beras dan 725.768 liter minyak goreng, dengan masing-masing penerima manfaat memperoleh 10 kilogram beras dan dua liter minyak

goreng per bulannya.

Bantuan pangan tersebut mulai dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sejak Kamis, 11 Juni 2026, dengan titik pertama berada di Desa Pabean Kecamatan Sedati yang didistribusikan kepada 1.146 orang warga oleh Bupati Sidoarjo Subandi.

Selanjutnya, pada 12 Juni 2026, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyalurkan bantuan pangan bagi sebanyak 405 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gelam dan 189 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Balonggabus, Kecamatan Candi.

Pada 15 Juni 2026, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyalurkan bantuan pangan bagi 1.600 Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Wonoayu dengan rincian sebanyak 557 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Karangpuri, 541 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Wonokalang, dan 502 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Simoangin-angin.

Bantuan pangan juga disalurkan kepada 934 Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan

Sukodono, oleh Bupati Sidoarjo Subandi pada pada libur Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram, Selasa, 16 Juni 2026, yang meliputi Desa Bangsri sebanyak 349 Keluarga Penerima Manfaat, Desa Plumbungan sebanyak 231 Keluarga Penerima Manfaat, dan Desa Sambungrejo sebanyak 354 Keluarga Penerima Manfaat.

Selanjutnya, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Sidoarjo, Sriatun Subandi, menyalurkan bantuan pangan di Kecamatan Gedangan dengan total 1.451 Keluarga Penerima Manfaat yang terdiri atas 570 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Keboanonom, 376 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Ganting, dan 505 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Karangbong.

Kemudian Sebanyak 2.052 Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan pangan tersebut dengan rincian Desa Kalisampurno sebanyak 555 Keluarga Penerima Manfaat, Desa Ganggangpanjang sebanyak 485 Keluarga Penerima Manfaat, Desa Watutulis sebanyak 604 Keluarga Penerima Manfaat, dan Desa Temu sebanyak 408 penerima.

Bupati Sidoarjo Subandi dalam penyaluran bantuan tersebut pada Kamis, 11 Juni 2026, di Desa Pabean Kecamatan Sedati, mengatakan pemerintah daerah akan terus mengawal penyaluran bantuan pangan agar berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai data penerima yang telah ditetapkan.

Setiap keluarga penerima manfaat, lanjutnya, memperoleh bantuan untuk dua bulan sekaligus berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng yang diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk alokasi dua bulan tersebut. (udi)

BERITA METRO

www.beritametro.id



DIAWASI: Salah satu proyek penambalan jalan berlubang menjadi prioritas Pemkab.

Bupati Minta Proyek 2026 Tak Lagi Molor

KOTA-Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan tidak ingin proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026 kembali mengalami keterlambatan seperti yang terjadi pada sejumlah pekerjaan di tahun sebelumnya.

Menurutnya, berbagai persoalan keterlambatan maupun deviasi pekerjaan harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tata kelola pembangunan di Kabupaten Sidoarjo semakin baik dan profesional.

"Kita ingin berbenah. Kita koreksi persoalannya sampai di mana. Ke depan kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus," tegas Subandi, Selasa (23/6).

Ia menekankan, fungsi pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administrasi, tetapi harus disertai pengecekan langsung di lapangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas diminta lebih aktif memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan spesifikasi.

"Kalau ada pekerjaan yang tidak bagus harus diberikan catatan. Pengawasan harus dilakukan ketat karena baik buruknya pembangunan Sidoarjo tergantung pada komitmen kita bersama," ujarnya.

Subandi juga menegaskan tidak ingin lagi

proyek pemerintah berujung pada keterlambatan yang berakibat denda. Menurutnya, proyek yang molor menunjukkan adanya proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya tidak suka pekerjaan sampai terkena denda karena molor, karena itu menunjukkan ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Ia mengingatkan bahwa seluruh pembangunan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan hasil pekerjaan yang berkualitas dan tepat waktu.

"Mari bersama-sama membangun Sidoarjo dengan penuh amanah. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Subandi secara khusus meminta para PPK agar tidak lengah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika ditemukan indikasi keterlambatan, ia meminta agar segera dilakukan langkah penanganan sebelum masalah semakin besar.

"Kepada para PPK saya minta betul-betul melakukan pengawasan. Kalau ada keterlambatan harus segera ditindaklanjuti," tandasnya.

● Ke Halaman 10

Bupati Minta Proyek...

Menurutnya, pengawasan ketat juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola proyek pemerintah serta menindaklanjuti arahan pencegahan dari Komisi Pemberantasan

Korupsi agar potensi masalah dapat diantisipasi sejak dini.

Ia optimistis pembangunan di Kabupaten Sidoarjo akan berjalan lebih lancar apabila seluruh pihak mulai dari kontraktor, PPK, hingga konsultan pengawas—menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya secara maksimal.

“Saya yakin kalau semua bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, pembangunan akan berjalan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

rasa 6 bulan... Undang RI Nomor 12 Ta-... Rohmawati Lailah mem-... resti Sidoarjo, ujar AKP... dan membawanya ke... angan lain sebelum mela-... ban anak. (sur/vga)

✓ Dorong Anak Yatim Berani Bermimpi dan Mandiri

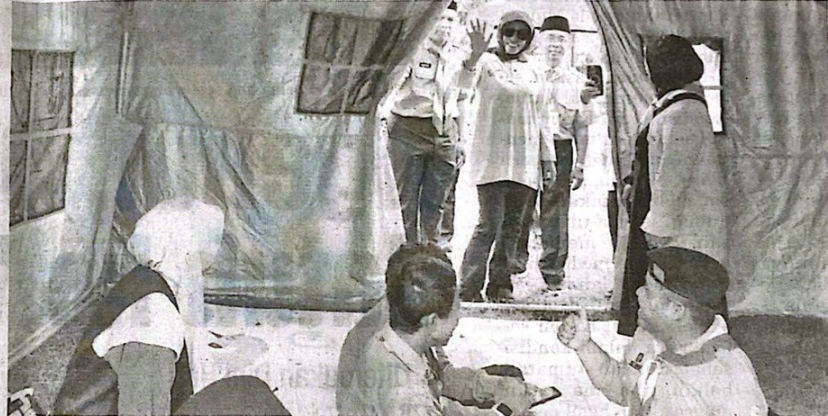
■ Wabup Buka 1.000 Yatim Camp

KREMBUNG-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana secara resmi membuka kegiatan 1.000 Yatim Camp yang digelar Forum Daerah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (FORDA LKSA) Kabupaten Sidoarjo di Bumi Perkemahan Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Minggu (21/6).

Kegiatan perkemahan yang diikuti peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, serta anak-anak binaan LKSA tersebut berlangsung selama dua hari hingga Senin (22/6).

Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta serta penyerahan simbolis bantuan transportasi oleh Wakil Bupati Sidoarjo. Suasana kegiatan semakin semarak dengan penampilan Tari Remo dari Yayasan Nurma Sidoarjo dan pertunjukan semaphore Pramuka.

Turut hadir dalam kegiatan ter-



PEDULI:
Wakil Bupati
Sidoarjo Mimik
Idayana
membuka
kegiatan 1.000
Yatim Camp di
Bumi Perkema-
han Tanjek
Wagir, Kecama-
tan Krembung,
Minggu (21/6).

sebut Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo, serta para pembina dan pendamping peserta.

Dalam sambutannya, Mimik menyampaikan bahwa kegiatan 1.000

Yatim Camp bukan sekadar kegiatan perkemahan, tetapi menjadi wadah pembelajaran bagi anak-anak untuk membangun karakter, kemandirian, dan rasa percaya diri.

"Kegiatan ini bukan hanya tentang berkemah atau berkumpul

bersama, tetapi menjadi ruang belajar tentang kehidupan. Anak-anak belajar menjadi pribadi yang mandiri, berani bermimpi, saling membantu, dan memiliki kepercayaan diri untuk meraih cita-cita," ujarnya. (dik/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner

Sambungan



...
ukan
ggal-
ger-

pria
rang
ban
ban
an
zah

g
n



Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo Beri Layanan Kesehatan ke 5.325 ODGJ Berat

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 5.325 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat telah mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Data tersebut menjadi dasar pemetaan kebutuhan layanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

PELAKSANA Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo, dr Rahmi Alfianti Nisaul Khoiro mengatakan, pemetaan dilakukan untuk memastikan seluruh pasien memperoleh akses pengobatan dan pendampingan secara berkelanjutan.

"Data ini menjadi dasar kami dalam memetakan kebutuhan layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya agar setiap sasaran dapat memperoleh akses pengobatan yang berkesinambungan dan layanan yang merata," kata Rahmi kepala

da wartawan, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan data Dinkes Sidoarjo, dari total 5.325 ODGJ berat yang terlayani, mayoritas merupakan penderita skizofrenia. Rinciannya, kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 5 orang, usia 15-59 tahun sebanyak 4.622 orang, dan usia di atas 60 tahun sebanyak 647 orang.

Sementara untuk kategori psikotik akut, tercatat 1 orang pada kelompok usia 0-14 tahun, sebanyak 35 orang pada usia 15-59 tahun, dan 15 orang pada usia di atas 60 tahun.

Secara keseluruhan, jumlah ODGJ berat yang mendapatkan layanan terdiri dari 6 orang usia 0-14 tahun, 4.657 orang usia produktif 15-59 tahun, dan 662 orang lansia. Totalnya mencapai 5.325 orang yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Jika dilihat berdasarkan sebaran wilayah, Kecamatan Taman menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terbanyak yakni 322 orang. Disusul Kecamatan Sukodono sebanyak 255 orang, Waru 252 orang, Candi 226 orang,

Sedati 223 orang, Sidoarjo Kota 217 orang, Buduran 211 orang, Trosobo 195 orang, Prambon 188 orang, dan Krian 187 orang.

Sedangkan berdasarkan cakupan pelayanan puskesmas, wilayah kerja Puskesmas Taman mencatat jumlah ODGJ berat terlayani tertinggi sebanyak 413 orang. Berikutnya Puskesmas Sidoarjo melayani 397 orang dan Puskesmas Waru sebanyak 342 orang.

Menurut Dinkes, tingginya jumlah sasaran di wilayah tersebut dipengaruhi oleh kepadatan penduduk serta kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di kawasan penyangga perkotaan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa, Dinkes Sidoarjo terus melakukan sejumlah langkah strategis. Mulai dari pemerataan distribusi obat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan jiwa, edukasi kepada keluarga pasien, hingga memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan lingkungan RT/RW. (md/rus)

Ribuan V Nikmati T Gratis di

Jombang – HARI
Ribuan warga Jombang, pada : memanfaatkan prog oleh Kepolisian : rangka memper Aksi sosial ini tan yang sudah : berlangsung hi Kabiddokkes Prastowo, menj garakan secara koordinasi lan; Mabes Polri. "s bakti kesehatan Jawa Timur, pi Bhayangkara : Polda Jatim n tkan manfaat r mencakuppela Selanjutny: camalahirkan lainnya meny masyarakat r

Berbagai fi aya sepeser p alis, operasi l gigi, hingga : Tidak har Polda Jatim Prioritas. Pr ini dirancang bagi mitra P "Pemegan setara deng istrasi pend Meski bej menjadi pe grasikan lay tkan inform langsung da



Kabiddokk
Edi Prastov

CS Dipindai dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Dishub Petakan Rute Feeder yang Terkoneksi Trans' Jatim

Dana dari Pemprov,
Disiapkan 25 Armada

SIDOARJO – Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo mulai mematangkan rencana pengoperasian feeder bus Trans Jatim. Saat ini, rute

LAYANAN TRANSPORTASI: Trans Jatim koridor 1 berhenti di Alun-Alun Sidoarjo kemarin (23/6). Pemkab menyiapkan angkutan khusus untuk mendukung operasional bus tersebut.

angkutan penumpang angkutan yang dikelola Pemprov Jatim itu mulai dipetakan.

Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki mengatakan, Pemkab mendapat anggaran Rp 3 miliar dari pemprov. Dana itu bakal dibelanjakan untuk pengadaan angkutan. Jika dikalkulasi, jumlahnya bisa mencapai 25 unit.

"Rutenya sedang dikaji dan bakal dikoneksikan dengan rute Trans Jatim," kata Budi. Menurut dia, pemetaan pen-

ting agar pengadaan angkutan efektif. "Setelah penyusunan peta nanti ada pembahasan bersama," tambah Budi.

Keberadaan feeder diharapkan dapat menambah pilihan transportasi bagi masyarakat. Warga juga akan lebih mudah menjangkau layanan Trans Jatim dari kawasan permukiman maupun pusat aktivitas. Dengan dukungan tersebut, akses transportasi umum di Kota Delta akan semakin luas. (ful/hen)

Jawa Pos





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

berkontribusi terhadap terben-
tuknya sisa anggaran tersebut.
"Besarnya SiLPA Tahun An-

lapangan, realisasi pendapatan
yang melampaui target, serta
adanya efisiensi dalam belanja

harus dibenahi pemerintah daerah.
Karena itu, evaluasi menyeluruh
akan dilakukan agar perencanaan

menauap peningkatan kesejahter-
aan masyarakat, pembangunan
infrastruktur, serta penguatan
pelayanan publik. (md/rus)

22 Calon Pengantin di Sidoarjo Positif HIV

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Fakta mengejutkan terungkap
di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak
22 calon pengantin (catin)
dinyatakan positif HIV hingga
awal Juni 2026. Temuan tersebut
menjadi alarm serius karena
jumlah kasus yang terdeteksi
diyakini hanya sebagian kecil
dari kondisi sebenarnya yang
ada di masyarakat.

Direktur Program Yayasan
Delta Crisis Center (DCC)
Sidoarjo, Ferry Efendi
mengatakan, dari 22 calon pengantin
yang terdeteksi positif HIV, terdiri
atas 12 laki-laki dan 10 perempuan.
"Kami menemukan 22 calon pengantin
positif HIV hingga Juni 2026.
Rinciannya 12 orang laki-laki dan
10 orang perempuan," kata Ferry,
Selasa (23/6/2026).
Menurut Ferry, kondisi tersebut
berpotensi memunculkan kasus HIV
baru setelah pasangan menikah.

kehidupan rumah tangga, terutama
apabila pasangan yang masih negatif
tidak mendapatkan edukasi dan pendampingan
yang memadai. "Artinya saat mereka menikah,
akan dimungkinkan muncul kasus positif HIV baru
apabila tidak segera dilakukan edukasi dan
intervensi secara komprehensif kepada pasangan tersebut," ujarnya.
Ferry menjelaskan, hingga saat ini tes HIV belum menjadi syarat wajib dalam proses pernikahan.
Calon pengantin umumnya hanya diminta melampirkan surat keterangan kesehatan,
sedangkan pemeriksaan HIV masih bersifat sukarela.
Kondisi itu, lanjut Ferry, menyebabkan masih ada kemungkinan sejumlah calon pengantin dengan status HIV positif yang belum terdeteksi.
"Jika calon pengantin menolak tes HIV, maka tidak bisa diketahui apakah status HIV mereka positif atau negatif. Padahal ada kemungkinan kasus-kasus seperti ini belum terungkap," katanya.
Ferry menilai temuan 22 calon pengantin

gantin positif HIV tersebut merupakan gambaran dari fenomena gunung es (iceberg phenomenon), yakni jumlah kasus yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah sebenarnya yang ada di masyarakat.
"Angka 22 kasus mungkin terlihat kecil, tetapi ini merupakan bagian dari fenomena gunung es. Kasus yang muncul ke permukaan kemungkinan jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat," jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan status kesehatan kepada pasangan sebelum menikah. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah penularan HIV dan menekan bertambahnya jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) baru.
"Pasangan harus saling terbuka terkait status kesehatannya sebelum menikah. Dengan begitu langkah pencegahan bisa dilakukan lebih awal," ungkapnya.
Meski demikian, Ferry menegaskan

pasangan dengan status HIV berbeda atau serodiskordan tetap dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan aman apabila mengikuti program pencegahan secara konsisten.
"Jika pernikahan tetap dilanjutkan atas dasar cinta, maka pasangan yang negatif harus siap memberikan dukungan kepada pasangannya yang positif dan bersedia mengikuti program pencegahan secara komprehensif," tegasnya.
Dalam hubungan suami istri, pasangan dengan status HIV berbeda dianjurkan menggunakan kondom untuk mengurangi risiko penularan. Selain itu, pasangan yang masih negatif juga dapat mengikuti program Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), yakni pemberian obat antiretroviral (ARV) bagi individu yang belum terinfeksi HIV namun memiliki risiko tinggi tertular.
"Pemeriksaan HIV secara berkala, minimal enam bulan sekali, juga penting dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan pasangan," tambah Ferry. (md/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

Dibuat Warga Jombang

RABU, 24 JUNI 2026

Warga Khawatir Tanggul Jebol, PPLS Pastikan Masih Aman

Kekhawatiran warga terhadap kondisi tanggul penahan lumpur di kawasan Porong, Sidoarjo, mendapat perhatian dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Hingga saat ini, PPLS memastikan kondisi tanggul masih aman dan belum masuk kategori kritis.

Diky Putra Sansirl, Wartawan Radar Sidoarjo

BERBAGAI upaya mitigasi terus dilakukan untuk menjaga stabilitas tanggul, mulai dari pemantauan ketinggian air hingga pengaliran lumpur dari dalam waduk menuju Sungai Porong guna menjaga kapasitas tampung area penampungan lumpur.

Perwakilan PPLS Willem S mengatakan, pengaliran lumpur tidak dilakukan sepanjang hari. Aktivitas tersebut menyesuaikan jam kerja yang telah diatur dalam kontrak dengan sistem kerja bergantian atau shift.

"Tidak. Pengaliran dilakukan sesuai jam kerja yang telah ditetapkan secara kontraktual. Sistemnya menggunakan shift, sa-

tu shift selama delapan jam," ujarnya.

Dalam kondisi tertentu, lanjut Willem, pengaliran dapat dilakukan hingga dua shift atau menyesuaikan kebutuhan berdasarkan situasi di lapangan.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian utama PPLS saat ini adalah ketinggian air di dalam area waduk lumpur. Terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang dapat meningkatkan volume air hingga berisiko meluap.

"Sudah ada beberapa instrumen yang kami pasang di sekitar tanggul untuk melakukan pemantauan.

● Ke Halaman 10



Dipindai dengan CamScanner

WASWAS: Kondisi rembesan air dari tanggul lumpur membuat warga sekitar khawatir jebol.

DIKY SANSIRU/RADAR SIDOARJO

RADAR
SIDOARJO.ID

Warga Khawatir...

"Yang perlu diperhatikan adalah kondisi air. Saat hujan dengan intensitas tertentu, ketinggian air bisa naik dan berpotensi melimpas," jelasnya.

Menurut Willem, pengaliran lumpur ke Sungai Porong merupakan langkah mitigasi untuk menjaga kapasitas

penyimpanan waduk. Dengan berkurangnya volume lumpur di dalam waduk, tekanan terhadap area penampungan dapat tetap terkendali.

"Penanganan yang kami lakukan signifikan mitigasi, terutama di permukaan. Kami mengalirkan lumpur dari dalam waduk agar keluar sehingga kapasitas penyimpanan (storage) tetap

terjaga," terangnya.

Selain pengelolaan volume lumpur, PPLS juga rutin melakukan pengawasan terhadap kondisi tanggul. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan struktur penahan lumpur tetap stabil dan mampu menjalankan fungsinya.

"Tanggul menjadi bagian dari mitigasi dan perhatian kami. Kami selalu

menjaga agar tanggul tetap aman dan stabil. Setiap tahun juga dilakukan pengaliran secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur yang ada di dalam waduk," katanya.

Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi tanggul jebol, Willem menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, kondisi tanggul

masih dalam keadaan aman.

"Kalau dikatakan kritis sebenarnya tidak. Struktur utama tanggul yang berada di bawah masih menjadi penahan utama, sedangkan bagian atas merupakan tambahan. Untuk stabilitas tanggul sendiri masih aman. Yang harus benar-benar diperhatikan adalah kondisi airnya," tegasnya. (dik/vga)

RADAR
SIDOARJO.ID



ANGGER BONDAN/JAWA POS

RUANG PENDAMPINGAN: Penghuni liponsos meningkat seiring bertambahnya ODGJ.

Masalah Ekonomi dan Judol Picu Lonjakan Kasus ODGJ

Setahun Naik 1.199 Kasus

SIDOARJO – Jumlah kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Delta kian bertambah. Permasalahan ekonomi, keretakan rumah tangga, dan kecanduan judi online (judol) jadi pemicu orang mengalami gangguan jiwa.

Berdasarkan data dinkes, tercatat ada 5.325 ODGJ yang ditangani hingga akhir 2025. Angka tersebut bertambah 1.199 orang dibanding setahun sebelumnya. Pada 2024, dinkes menangani 4.126 ODGJ.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuantina mengatakan, tingginya temuan tersebut dipengaruhi oleh masifnya skrining kesehatan jiwa di puskesmas. "Skrining kesehatan jiwa dilakukan melalui berbagai layanan kesehatan, termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG)," kata Lakhsmie.

Dengan pemeriksaan yang semakin luas, lanjut dia, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental dapat terdeteksi lebih dini sehingga memperoleh penanganan lebih cepat. Lakhsmie mengatakan, banyak

ODGJ yang mengalami sakit jiwa karena keuangannya memburuk. Selain itu, adapula yang sakit setelah kecanduan judi online.

"Yang menjadi pemicu masalahnya berbeda-beda. Sehingga dalam penanganannya juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan," ujarnya. Lakhsmie menerapkan layanan penanganan secara berjenjang. Pasien yang masih dapat ditangani di puskesmas akan mendapatkan pengobatan dan pendampingan secara langsung. Sedangkan pasien sakit berat dirujuk ke rumah sakit. (ful/hen)

Jawa Pos

✓ Jumlah ODGJ Tembus 5.325 Orang, Kecamatan Taman Terbanyak

JUMLAH Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Sepanjang 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 5.325 ODGJ telah mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 5.242 orang. Data itu menunjukkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan

● Ke Halaman 10



EVAKUASI: Petugas saat melakukan penanganan terhadap ODGJ di Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah ODGJ Tembus...

jiwa di Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Dinkes Sidoarjo, wilayah kerja Puskesmas Taman menjadi daerah dengan jumlah ODGJ terbanyak yang mendapatkan pelayanan, yakni mencapai 413 orang. Disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang dan Puskesmas Waru dengan 342 orang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Rahmi Alfityanti Nurul Khoir mengatakan,

tingginya jumlah ODGJ di sejumlah wilayah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kepadatan penduduk hingga kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi. "Wilayah kerja Puskesmas Taman menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang. Kemudian disusul Puskesmas Sidoarjo dengan 397 orang dan Puskesmas Waru sebanyak 342 orang," ujar Rahmi, Selasa (23/6). Menurut Rahmi, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat layanan kesehatan jiwa agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan tepat. Salah satu upaya yang dilaku-

kan adalah mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa ke dalam layanan kesehatan primer melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah melakukan pemeriksaan maupun konsultasi sejak dini sehingga gangguan kesehatan mental dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Selain memperluas deteksi dini, Dinkes Sidoarjo juga melakukan sejumlah penguatan layanan, seperti memastikan ketersediaan obat,

meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan jiwa, memberikan edukasi kepada keluarga pasien, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga lingkungan RT/RW. "Melalui pemetaan ini kami berharap tidak ada penderita yang terlewat dari layanan kesehatan. Kolaborasi dengan kader, pemerintah desa, lingkungan RT/RW, serta keluarga sangat penting agar setiap kasus dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan penanganan yang tepat," jelasnya. Dinkes Sidoarjo juga terus meng-

kat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan kesehatan jiwa. Rahmi menambahkan, data jumlah ODGJ menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun program layanan kesehatan jiwa yang lebih tepat sasaran. "Data ini menjadi dasar kami dalam memetakan kebutuhan layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya agar setiap sasaran memperoleh akses pengobatan yang berkesinambungan dan layanan yang merata," ujarnya. (dik/vga)



PEPALA BIRO/PEMIMPIN HEDAKSI: Vega Tiwi Alistia. STAF HEDAKSI: Diky Purno Sansiri, Suriyanto. LAYOUTER: Sapto Adi. PEMASARAN: Anas. IKLAN: Rudianto. LANGGANAN: Rp 95.000/bulan. TARIF IKLAN: Display Full Colour Rp 65.000/mm kolom, Black White Rp 42.500/mm kolom, Advertorial FC Rp 40.000/mm kolom, BW Rp 30.000/mm kolom. Email: radarsidoarjo@gmail.com SURABAYA: Jl. Kembang Jepun 167-169 Surabaya. TELEPON: (031) 3559490. PENERBIT: PT Radar Media Surabaya. PERCETAKAN: PT Temprina Media Grafika, Jl Sumengko Km. 30-31 Wringinanom, Gresik. DIREKTUR: Lilik Widyanoro. Hotline: 08132217588.





INFRASTRUKTUR



ANGGER BONDAN/JAWA POS

RAWAN RUSAK: Pembangunan ulang Jembatan Candinegoro menelan anggaran Rp 1,6 miliar.

Rehabilitasi Jembatan Desa Candinegoro-Bendotretrek Dianggarkan Rp 2 M

SIDOARJO – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo bakal membangun ulang dua jembatan di Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu dan Desa Bendotretrek, Kecamatan Prambon tahun ini. Pembangunan tersebut disiapkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan, pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya pemerataan infrastruktur di Kota Delta. "Kita membangun akses untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, dua titik tersebut cukup ramai dilewati masyarakat. Infrastruktur penghubung memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, kondisi jembatan yang perlu renovasi juga menjadi pertimbangan penting. (ful/hen)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Legislatif Dorong Percepatan Pembangunan Dua Puskesmas di Sidoarjo



SIDOARJO | Barometerjatim.com - Anggota Legislatif Kabupaten Sidoarjo mendorong adanya percepatan terhadap pembangunan dua Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang dihimpun oleh komisi D DPRD Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo masih memiliki sekitar 31 Puskesmas dari jumlah total daerah dengan kategori ideal sebanyak 60-70 Puskesmas. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menilai tingkat kebutuhan pembangunan Puskesmas di Sidoarjo sangat mendesak. Berdasarkan standar ideal, satu Puskesmas melayani sekitar 30 ribu penduduk. Dengan jumlah penduduk Sidoarjo yang mendekati dua juta jiwa, daerah ini idealnya memiliki sekitar 60 hingga 70 Puskesmas. "Sementara saat ini jumlah Puskesmas yang tersedia baru 31 unit. Artinya kita masih kekurangan hampir separuh," ungkap Bangun politisi asal Fraksi PAN, Sabtu (20/6/2026). Menurutnya, keberadaan Puskesmas ini sangat penting karena menjadi ujung tombak layanan promotif dan preventif, bukan hanya pengobatan. Keberadaan Puskesmas juga berperan besar dalam mendedukasi kesehatan masyarakat dan deteksi dini berbagai penyakit. "Selain itu untuk upaya pencegahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan asam urat," jelasnya. Pembangunan dua Puskesmas, lanjutnya, telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Subandi. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding RPJMD sebelumnya (Bupati Muhdlor) yang menargetkan pembangunan empat Puskesmas. "Di RPJMD yang baru ini satu tahun ditargetkan dua Puskesmas. Awalnya direncanakan berada di Geluran, Kecamatan Taman, dan Sukodono. Namun keduanya masih terkendala persoalan lahan," ujar Bangun. Menurutnya, lahan yang direncanakan di Kelurahan Geluran merupakan aset Pemda yang selama ini dimanfaatkan warga sebagai lapangan sepak bola dan ruang terbuka. Warga meminta adanya lahan pengganti apabila lokasi tersebut digunakan untuk pembangunan Puskesmas. Sementara di Kecamatan Sukodono, persoalan serupa juga terjadi, sehingga sampai saat ini belum ada lokasi yang benar-benar dipastikan untuk pembangunan Puskesmas di kawasan tersebut. "Kami meminta Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan bagian aset agar aset-aset Pemda yang sudah siap bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Puskesmas,"

tambahnya. Bangun menyebut ada sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan Puskesmas baru antara lain Kecamatan Krian dan Krembung. Di Krian terdapat lahan milik Pemda di Kelurahan Kemas yang dinilai siap digunakan. Selain itu, beberapa kecamatan lain yang saat ini hanya memiliki satu Puskesmas seperti Prambon, Krembung, Buduran, dan Sedati juga dinilai membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut. "Yang paling urgen memang kecamatan yang hanya memiliki satu Puskesmas. Tapi kecamatan Taman juga membutuhkan karena jumlah penduduknya sudah lebih dari 200 ribu jiwa," jelasnya. Rp 8 M Tiap Puskesmas : Untuk pembangunan fisik, lanjut Bangun, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8 miliar per unit Puskesmas. Namun apabila dilengkapi dengan sarana prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan anggarannya dapat mencapai sekitar Rp 20 miliar per Puskesmas. "Tahun ini targetnya bangunan fisik. Sedangkan pengadaan alat dan SDM dipersiapkan pada tahun berikutnya," tambah Bangun. Bangun juga mengingatkan pentingnya kesiapan SDM kesehatan untuk mendukung operasional fasilitas baru tersebut. Menurutnya, satu Puskesmas membutuhkan sedikitnya 50 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga pendukung. "Ya, untuk sekelas Puskesmas kira-kira butuh sekitar 50-90 nakes dan tenaga pendukungnya. Berbeda dengan rumah sakit. Pastinya lebih banyak," jelasnya. Dalam pelaksanaannya, DPRD Sidoarjo juga membuka opsi fleksibilitas pembangunan, baik melalui pembangunan gedung baru maupun peningkatan status Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas penuh. Langkah tersebut, lanjutnya diharapkan dapat mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu pembangunan baru secara keseluruhan. "Terutama di kecamatan yang padat penduduk, seperti di taman maupun di Waru itu sangat membutuhkan tambahan puskesmas agar pelayanan kesehatan lebih merata," ujarnya. Dua Terancam Gagal : Berbeda dengan anggota komisi C DPRD Sidoarjo, Zakaria Dimas. Politisi asal Fraksi Nasdem ini menilai hingga saat ini proses pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas masih menemui banyak kendala. Akibatnya, anggaran yang telah disiapkan berpotensi direvisi melalui perubahan anggaran. "Kayaknya tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Kemungkinan akan ada revisi anggaran untuk pembangunan dua puskesmas itu, karena sampai sekarang pengadaan lahannya belum berhasil," ujarnya. Menurut Zakaria, semula terdapat dua lokasi yang bakal direncanakan menjadi tempat pembangunan puskesmas. Yakni di Desa Jangkingsari, Kecamatan Sukodono, dan Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman. Namun kedua lokasi tersebut menghadapi persoalan berbeda. Di Jangkingsari misalnya, lahan yang direncanakan merupakan aset yang saat ini digunakan sebagai sekolah dasar. Meski awalnya merupakan tanah desa, aset tersebut kini sedang dalam proses pengurusan oleh pemerintah desa sehingga tidak bisa digunakan untuk pembangunan Puskesmas. "Yang di Jangkingsari itu lahannya SD. Dulunya memang tanah desa yang dipakai sekolah, tapi sekarang sedang diurus desa dan diminta kembali. Akhirnya lokasi itu tidak bisa dipakai," jelasnya. Sementara di Geluran, Kecamatan Taman masih menemui jalan buntu setelah muncul penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan. Lahan yang diusulkan merupakan lahan lapangan yang selama ini digunakan warga untuk kegiatan olahraga. "Beberapa tokoh masyarakat dan pengurus RT menolak. Mereka ingin lapangan itu tetap difungsikan seperti sekarang, sehingga rencana pembangunan Puskesmas di sana juga tidak bisa berjalan," tambahnya. Padahal, menurut Dimas, kebutuhan Puskesmas di wilayah Kecamatan Taman cukup mendesak. Saat ini jumlah Puskesmas yang tersedia dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. "Kebutuhan Puskesmas di Taman sebenarnya enam unit, sementara yang ada sekarang hanya dua. Warga Geluran, Wage, Bohar



dan sekitarnya masih harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan," katanya. Dimas menilai lokasi Geluran sebenarnya sangat strategis karena dekat dengan kawasan permukiman. Bahkan warga yang akan merasakan manfaat langsung dari keberadaan puskesmas disebut lebih banyak yang mendukung dibanding yang menolak. "Sebenarnya warga yang terdampak langsung lebih sepakat ada Puskesmas karena kalau berobat harus menyeberang jalan dan cukup jauh menuju Puskesmas yang ada sekarang," tandasnya. Karena itu, pihaknya meminta agar Pemkab Sidoarjo segera menghitung kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, kemudian mengajukan formasi tersebut ke pemerintah pusat. "Kalau formasi ASN atau PPPK belum mencukupi, harus segera diantisipasi melalui rekrutmen tenaga profesional BLUD non-ASN agar pelayanan bisa langsung berjalan saat fasilitas kesehatan sudah siap," tegas Bangun. Komisi D DPRD Sidoarjo terus mendorong Dinas Kesehatan Sidoarjo agar segera menyelesaikan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, proses lelang pengawasan, hingga lelang pekerjaan fisik sehingga target pembangunan dapat terealisasi sesuai jadwal. Senada disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. Menurutnya penambahan layanan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. DPRD Sidoarjo bersama pemerintah daerah telah menargetkan pembangunan dua Puskesmas baru pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. "Agar pelayanan bisa lebih merata, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi," ujarnya. Nasih menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh berjalan lambat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. DPRD ingin masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan tempat tinggal mereka.

